

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Minyak bumi merupakan salah-satu komoditas vital dalam kehidupan ekonomi manusia di dunia. Dalam berjalannya perekonomian global saat ini, konsumsi energi merupakan sebuah roda penggerak utama, dimana jantung pembangunan ekonomi berada pada kemampuan sektor industri dan transportasi untuk mendapatkan akses berkelanjutan terhadap sumber energi. Saat ini sumber energi utama yang digunakan oleh kedua sektor di atas adalah minyak bumi, gas alam dan batu bara. Berbeda dengan gas alam dan batu bara, minyak bumi merupakan sumber energi yang saat ini dominan digunakan di sektor transportasi. Oleh karenanya minyak bumi merupakan komoditas sumber energi yang saat ini dianggap paling bernilai di tingkat global. (Overholt, 2016)

Vitalnya posisi minyak bumi dalam perekonomian dunia saat ini membuat negara-negara di dunia memiliki masing-masing kebijakan energi yang bertujuan untuk mengamankan pasokan energi dalam negeri, baik melalui produksi minyak domestik maupun melalui impor. Di sisi lain, negara-negara produsen minyak memiliki posisi tawar-menawar yang tinggi, dengan penggunaan minyak sebagai senjata untuk pemenuhan kepentingan nasional mereka. Sejarah mencatat telah banyak terjadi konflik yang dipicu oleh faktor kepemilikan minyak bumi.

Di tahun 2015, AS merupakan negara produsen terbesar ketiga dan konsumen minyak bumi terbesar di dunia. AS memproduksi minyak bumi senilai 9,4 juta bph, (bph=barel per hari; 1 barel = 159 liter) atau sekitar 12% dari jumlah produksi global. Produksi minyak bumi AS hanya lebih rendah dari Rusia (10,5 juta bph) dan Arab Saudi (10,4 juta bph). Di tahun 2015 AS merupakan konsumen minyak

terbesar di dunia dimana AS mengkonsumsi minyak bumi senilai 19,5 juta bph, di atas Tiongkok dan India yang mengkonsumsi minyak bumi senilai 12,3 dan 4,1 juta bph. Konsumsi AS terhadap minyak bumi yang jauh melebihi kemampuan produksinya sendiri ini mengakibatkan AS mengalami ketergantungan pada impor minyak dari luar negeri. (Council of Foreign Relations, 2016)

Besarnya ketergantungan AS terhadap impor minyak dari luar ini sempat menjadi masalah domestik ketika terjadi krisis energi di tahun 1973. Dukungan AS terhadap Israel pada perang Yom Kippur mengakibatkan negara-negara Arab mengembargo minyak ke AS. Embargo ini membuat AS mengalami kelangkaan minyak parah yang berdampak pada resesi ekonomi yang terjadi dari 1973 sampai 1975. Untuk mencegah terjadinya hal serupa, di tahun 1975 Kongres AS meloloskan kebijakan *Energy Policy and Conservation Act* (EPCA) yang bertujuan untuk menjaga pasokan minyak domestik dan stabilitas ekonomi AS secara umum, melalui terbentuknya sistem cadangan minyak bumi strategis (*Strategic Petroleum Reserve; SPR*) dan ditetapkan larangan ekspor minyak hasil produksi domestik ke luar negeri. (U.S. Department of Energy, 2016) EPCA menyatakan secara tegas bahwa pemerintah AS diberikan kewenangan untuk melarang ekspor hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam ke luar negeri demi menjaga pasokan hasil tambang tersebut untuk kegunaan di dalam negeri. Dengan terjaganya pasokan ini maka kemungkinan terjadinya krisis energi dan resesi ekonomi yang serupa di masa depan bisa diminimalisir.

Setelah selang beberapa dekade, di tahun 2008 terjadi resesi besar di tingkat global. Resesi ini merupakan sebab utama dari melambatnya laju pertumbuhan ekonomi antara 2009-2013. Melambatnya laju pertumbuhan ini menimbulkan dampak negatif terhadap permintaan minyak bumi dunia, dimana harga minyak bumi per barel yang pernah naik sampai pada US\$ 141 pada Juli 2008 turun tajam ke harga US\$ 33 pada Desember 2008. Seiring dengan berjalannya pemulihan

ekonomi global sejak pertengahan 2009, harga minyak bumi kembali naik pada kisaran US\$ 60-80. Namun harga tersebut kembali turun tajam ke harga dibawah US\$ 50 per barel di penghujung 2014. Penurunan harga minyak di tahun 2014 ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat yang melambat di awal dekade 2010an membantu turunnya harga minyak ke harga yang sama ketika pemulihan ekonomi di tahun 2009 berlangsung. (Rogoff, 2016)

Sementara di Amerika Utara, AS dan Kanada meningkatkan produksi minyak domestiknya sebagai respon terhadap kenaikan harga minyak ke harga US\$ 70 di pertengahan tahun 2010. AS dan Kanada merasa bahwa tingginya harga minyak berpengaruh negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi, karenanya peningkatan produksi minyak domestik dijalankan untuk mengurangi impor minyak dari luar negeri. Produksi minyak domestik AS dan Kanada mengalami kenaikan secara signifikan sejak tahun 2013 setelah dijalankannya metode ekstraksi baru yaitu teknik pengeboran batuan serpih atau *hydraulic fracturing* atau disingkat *fracking* secara masal, dimana teknik ini berhasil menaikkan jumlah minyak bumi hasil produksi domestik di tahun 2015. 4,9 juta barel minyak per hari dihasilkan di AS dari penggunaan teknik di atas. Minyak yang dihasilkan dari teknik *fracking* ini bernama *shale oil* atau *tight oil* karena bersumber dari lapisan batuan serpih yang sulit diekstraksi dengan teknik konvensional.

Fenomena-fenomena di atas telah mengakibatkan terjadinya *glut* atau kelebihan produksi yang berdampak pada penurunan harga minyak dunia secara drastis. OPEC yang mengadakan pertemuan pada November 2014 memutuskan untuk tidak membatasi produksi minyak para negara anggotanya, yang mengakibatkan harga minyak dunia semakin turun. Sepanjang tahun 2015, harga minyak sempat naik di atas US\$ 60 per barel antara April sampai Juni, namun kembali merosot di harga US\$ 38 per barel. (Elliott, The

Guardian - Opec bid to kill off US shale sends oil price down to 2009 low, 2015)

Kombinasi antara rendahnya harga minyak dunia dan tingginya produksi minyak domestik di AS memunculkan perdebatan dalam Kongres AS mengenai perlu atau tidaknya larangan ekspor minyak ke luar negeri dicabut. Mulai dari Oktober 2015, Kongres mengkaji pencabutan larangan ekspor tersebut. Partai Republik menyatakan bahwa larangan ekspor minyak sudah tidak relevan. Hal ini mendapatkan perlawanan dari kubu Partai Demokrat, dimana mereka berpendapat bahwa pencabutan larangan ekspor ini berpotensi memberi dampak buruk pada lingkungan karena meningkatnya kegiatan pengeboran yang berpotensi merusak seperti menurunkan tingkat kesuburan tanah, juga mengancam sektor industri hilir minyak yang terkait proses pengolahan minyak bumi menjadi berbagai komoditas di AS. Pada Desember 2015, Kongres memutuskan untuk mencabut larangan ekspor minyak bumi yang terkandung dalam EPCA sehingga AS bisa mengekspor minyak bumi produksi domestik ke luar negeri.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data-data dari Latar Belakang Masalah yang ditulis di atas, dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

**“Mengapa Kongres AS mencabut larangan ekspor minyak bumi ke luar negeri di saat harga minyak dunia rendah?”**

#### C. Kerangka Dasar Pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini, teori dan konsep yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### 1. Model Aktor Rasional

Dalam bukunya yang berjudul, *“Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi”*, Mochtar Mas’oed menyatakan bahwa,

“Politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu

pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini individu itu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu.” (Mas'ood, 1994)

Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama pemerintah yang bersifat kesatuan atau monolit (seragam). Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual untuk mencapai suatu tujuan. Negara terlebih dahulu memahami kebijakan luar negeri mana yang akan diprioritaskan, lalu menggunakan cara-cara yang tersedia untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan biaya termurah atau kerugian terkecil. Analisa hubungan biaya-manfaat ini melibatkan suatu kompromi antara berbagai pandangan politik luar negeri yang berbeda, dan akhirnya menghasilkan sebuah pilihan kebijakan luar negeri sebagai cerminan dari perhitungan akan kepentingan nasional suatu negara.

*Tabel 1.1 Perbandingan Untung-Rugi Antara Berbagai Pilihan*

Pilihan	Keuntungan	Kerugian
---------	------------	----------

Alternatif A	Banyak	Sedikit
Alternatif B	Banyak	Banyak
Alternatif C	Sedikit	Sedikit

*Sumber: Mochtar Mas'oe'd*

Dari perbandingan yang diketahui dalam tabel 1.1, alternatif A dianggap sebagai alternatif keputusan politik luar negeri yang paling optimal dikarenakan memiliki keuntungan yang banyak dan kerugian yang sedikit. Oleh karenanya, dalam model aktor rasional, apabila suatu negara dihadapkan pada ketiga pilihan di atas dalam menentukan keputusan politik luar negerinya, negara tersebut akan memilih alternatif A sebagai alternatif terbaik. (Allison & Zelikow, 1999)

Aplikasi dari teori ini dalam kasus yang diangkat disini adalah, Kongres AS sebagai aktor rasional disini dihadapkan pada pilihan berbeda mengenai kebijakan larangan ekspor minyak bumi ke luar negeri yang saat ini berlaku. Jika kebijakan larangan ekspor tersebut dicabut, maka AS berpotensi untuk mendapat tambahan pendapatan dalam APBN dari hasil penjualan minyak bumi ke luar negeri. Dicabutnya ekspor ini juga akan memberikan dorongan terhadap pelaku usaha di sektor migas untuk meningkatkan kegiatan produksi minyak bumi di dalam negeri, yang berefek pada meningkatnya lapangan pekerjaan di sektor tersebut.

*Tabel 1.2 Perbandingan dua alternatif kebijakan luar negeri AS yang bisa diambil terkait dengan ekspor minyak bumi*

Pilihan	Keuntungan	Kerugian
Larangan ekspor minyak bumi dicabut	APBN AS bertambah dari ekspor minyak bumi ke luar negeri, lapangan pekerjaan di sektor energi/migas	Pengeboran minyak bumi menurunkan tingkat kesuburan tanah, sektor industri hilir minyak di AS

	meningkat karena produksi minyak (baik untuk ekonomi)	mendapat pesaing dari luar negeri
Larangan ekspor minyak bumi dipertahankan	Terjaganya lingkungan dari dampak negatif pengeboran minyak bumi, industri hilir minyak di AS relatif tidak memiliki pesaing	Potensi menciptakan lapangan pekerjaan di sektor energi/migas hilang, APBN AS tidak mendapat tambahan (buruk untuk ekonomi)

Kerugian dari pencabutan di atas adalah, dari segi lingkungan meningkatnya kegiatan pengeboran akan berdampak negatif pada kesuburan tanah yang ada di sekitar lokasi pengeboran, sementara dari segi industri dicabutnya larangan ekspor minyak bumi akan menyebabkan sektor industri hilir minyak yang terkait dengan pengolahan minyak mentah ke berbagai komoditas di AS harus bersaing dengan pelaku industri dari luar negeri dalam membeli minyak mentah yang dihasilkan di AS.

Sementara itu, keuntungan dari tidak dicabutnya larangan ekspor minyak bumi ke luar negeri adalah, kerusakan lingkungan yang disebabkan dari kegiatan pengeboran minyak bumi dapat ditekan. Pelaku usaha di sektor industri hilir di AS juga tidak perlu merasa khawatir terhadap persaingan yang bisa terjadi dengan pelaku usaha dari luar negeri dalam mendapatkan akses terhadap minyak mentah yang diproduksi di AS. Kerugian dari tetap diberlakukannya larangan ekspor minyak bumi ini adalah AS berpotensi kehilangan kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja di sektor migas dan pendapatan tambahan dari hasil ekspor minyak bumi ke luar negeri.

Dari kedua pilihan yang disebutkan di atas, Kongres AS pada Desember 2015 memutuskan untuk mencabut kebijakan larangan ekspor minyak bumi, setelah larangan tersebut berlaku selama 4 dekade. Keputusan yang diambil melalui pemungutan suara ini didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, dimana mayoritas anggota Kongres menilai bahwa pencabutan larangan ekspor yang berlaku sebelumnya dianggap lebih menguntungkan untuk perekonomian AS yang masih berada dalam tahap pemulihan, dengan mengesampingkan dampak negatif yang berpotensi terjadi dari pencabutan kebijakan tersebut.

## 2. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Dalam bukunya yang berjudul, "*Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*", William D. Coplin menyatakan bahwa,

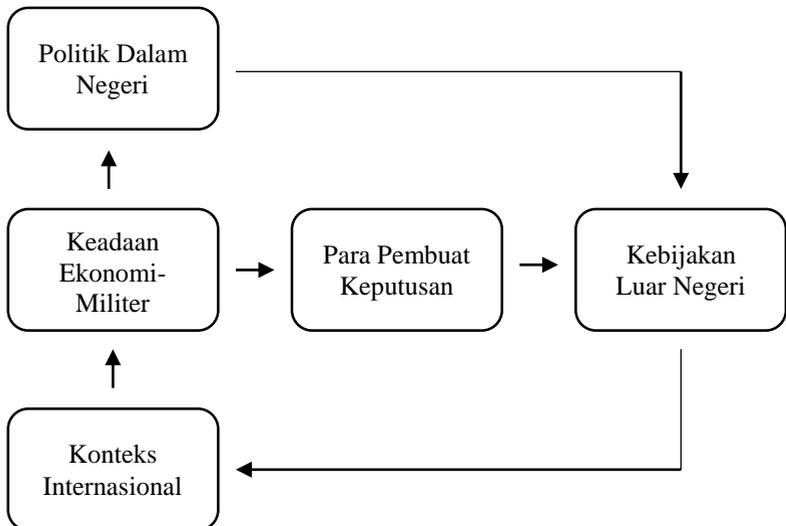
“Kebijakan luar negeri dilihat sebagai hasil dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi para pembuat kebijakan luar negeri tersebut; pertama, keadaan politik dalam negeri di suatu negara, termasuk faktor-faktor budaya yang mendasari perilaku politik manusia. Kedua, keadaan ekonomi dan militer dari negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam hal pertahanan/keamanan. Ketiga, konteks internasional yang menjadi tujuan dari kebijakan luar negeri negara tersebut serta pengaruh relevan dari negara-negara lain terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh negara pembuat kebijakan tersebut.” (Coplin & Marbun, 1992)

Keadaan politik dalam negeri disini merupakan suatu sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Dalam menentukan kebijakan luar negerinya, para pembuat keputusan di negara tersebut yang terdiri dari badan legislatif dan eksekutif, menentukan kebijakan luar negeri dengan pertimbangan keadaan ekonomi dan militer di negara tersebut. Coplin juga menyebut konteks

internasional sebagai faktor ketiga yang mempengaruhi bagaimana para pembuat keputusan di suatu negara menentukan kebijakan luar negerinya.

Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara proses pembuatan kebijakan luar negeri:

*Grafik 1.1 Hubungan antara Kebijakan Luar Negeri dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya menurut Coplin*



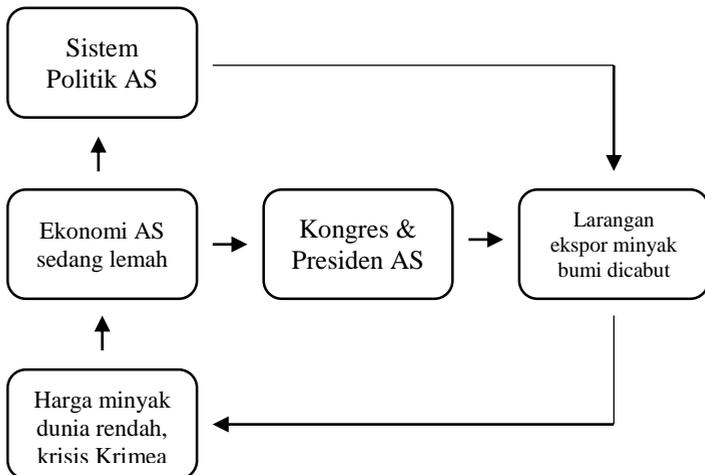
*Sumber: William D. Coplin*

Dalam menjalankan kebijakan politik luar negerinya, AS memiliki landasan berupa sistem politik yang dianut, sebagai republik dimana terdapat pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif, dan yudisial, serta demokrasi dimana rakyatnya diwakili oleh wakil rakyat di tingkat nasional. Sementara itu keadaan ekonomi AS di tahun 2015 masih lemah setelah AS mengalami resesi besar di tahun 2008, dan konteks internasional yang berlangsung saat itu adalah harga minyak dunia yang rendah dan krisis yang terjadi setelah Rusia menganeksasi

Krimea di tahun 2014, dimana AS menjalankan politik geostrateginya di kawasan Eropa dan Asia dengan tujuan menekan Rusia untuk melepas Krimea.

Untuk lebih jelasnya, dibawah ini merupakan penerapan dari grafik 1.1 yang menggambarkan proses pembuatan kebijakan luar negeri AS di tahun 2015:

*Grafik 1.2 Faktor-faktor penentu dicabutnya larangan ekspor minyak bumi AS di tahun 2015*



Grafik di atas dijelaskan oleh konsep kebijakan luar negeri sebagai berikut:

#### 1. Politik Dalam Negeri

Politik Dalam Negeri di suatu negara merupakan suatu faktor yang mempengaruhi penentuan kebijakan luar negeri secara langsung. Disini kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh suatu negara adalah hasil dari pertimbangan dari para pemimpin di negara tersebut berdasar gagasan politik yang dianut dan dijalankan di negara tersebut. (Hill, 2003)

Amerika Serikat adalah negara berbentuk republik yang menjalankan sistem demokrasi dan bermodel pemerintahan *trias politica* atau mengenal pemisahan kekuasaan di tingkat tertinggi. Kekuasaan pemerintahan AS di tingkat nasional atau federal terbagi dalam tiga cabang, yaitu cabang Eksekutif yang diwakili Presiden beserta anggota kabinetnya, cabang Legislatif yang diwakili Kongres, yang dibagi menjadi Senat dan DPR, serta cabang Yudisial diwakili oleh Mahkamah Agung AS (*Supreme Court of the United States*). Sebagai negara demokrasi, AS mengadakan pemilihan umum di tingkat nasional atau federal setiap empat tahun sekali untuk memilih Presiden baru, sementara pemilihan umum untuk memilih para senator dan wakil DPR diadakan setiap dua tahun sekali. Oleh karenanya, dalam satu masa jabatan Presiden susunan anggota Kongres dapat berubah dua kali, dimana partai yang menjadi mayoritas di tingkat Senat atau DPR pada satu masa jabatan Kongres dapat menjadi minoritas di masa jabatan Kongres yang selanjutnya. Sementara itu Mahkamah Agung AS terdiri dari sembilan hakim yang ditunjuk oleh Presiden dan disetujui Senat, dimana Mahkamah Agung tidak terlibat langsung dengan proses pembuatan keputusan politik seperti UU atau kebijakan pemerintah di AS.

## 2. Keadaan Ekonomi-Militer

Dalam menentukan kebijakan luar negerinya, suatu negara dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan militernya secara signifikan. Dua keadaan tersebut mempengaruhi bagaimana suatu negara menempatkan dirinya dalam politik internasional. Keadaan ekonomi menentukan bagaimana suatu negara mengeluarkan kebijakan terkait perdagangan, penanaman modal, dan pemberian bantuan luar negeri. Sementara keadaan militer menentukan bagaimana kebijakan terkait keamanan, lingkup pengaruh, dan cara suatu negara

memproyeksikan kekuasaannya dijalankan, baik melalui perang atau pemberian bantuan militer.

Di tahun 2015 keadaan ekonomi AS masih lemah setelah mengalami resesi besar di tahun 2008 dan berada di tahap pemulihan ekonomi. AS masih mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun setelah resesi berakhir di tahun 2009, dimana PDB AS di tahun 2014 hanya tumbuh senilai 2,4%. Keadaan di atas mempengaruhi para pembuat keputusan di AS dalam menentukan kebijakan luar negeri yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

### 3. Konteks Internasional

Konteks internasional disini merupakan keadaan-keadaan yang sedang berlangsung di skala internasional yang menjadi faktor yang memberi pengaruh terhadap penentuan kebijakan luar negeri dari suatu negara. Tindakan suatu negara terhadap isu-isu internasional yang ada adalah hasil dari pertimbangan-pertimbangan berdasarkan konteks saat itu. Di sini konteks internasional juga memberikan gambaran posisi hubungan suatu negara dengan negara-negara lain dalam sistem internasional.

Ketika kongres AS di tahun 2015 memutuskan untuk mencabut larangan ekspor minyak bumi sementara harga minyak dunia sedang turun, dunia internasional mengalami situasi kelebihan produksi minyak bumi oleh negara-negara penghasil minyak, yang berdampak langsung terhadap turunnya harga minyak dunia. Sementara itu berlangsung keregangan hubungan antara Rusia dan AS beserta negara-negara Eropa Barat sejak 2014 dikarenakan aneksasi Rusia terhadap wilayah Krimea di Ukraina dan sanksi yang diberikan kepada Rusia sebagai hukuman dari tindakan aneksasi tersebut. Dengan dicabutnya larangan ekspor minyak bumi, AS bisa memberikan alternatif sumber impor terhadap negara-negara yang

secara rutin mengimpor minyak bumi dari Rusia seperti Tiongkok dan negara-negara Eropa sehingga bisa mengganggu perekonomian Rusia dan membantu penerapan sanksi atas Rusia di atas.

D. Hipotesis

Pemerintah AS mencabut larangan ekspor minyak bumi ke luar negeri di saat harga minyak dunia rendah dikarenakan:

Adanya pertimbangan rasional untuk mendapatkan keuntungan ekonomi untuk menciptakan insentif terhadap pemulihan keadaan perekonomian AS.

E. Tujuan Penelitian

Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui respon pemerintah Amerika Serikat dalam bentuk kebijakan ekonomi dalam dan luar negeri di tahun 2015 sebagai reaksi terhadap turunnya harga minyak mentah dunia pada tahun 2014-2015, dimana kesimpulan dari skripsi ini akan memberikan jawaban dan pemahaman dari rumusan masalah, hipotesis dan kesimpulan yang sudah dibuat sebelumnya. Skripsi ini juga bisa memberikan kegunaan sebagai referensi atau bahan bacaan yang informatif kepada siapapun yang membutuhkan, khususnya kepada pembaca yang ingin mengetahui hal-hal seperti ekonomi politik AS, dampak makroekonomi global terhadap perekonomian di suatu negara, dan korelasi antara perdagangan komoditas tertentu seperti minyak terhadap laju perekonomian di suatu negara.

F. Jangkauan Penelitian

Skripsi ini akan membahas mengenai pengambilan kebijakan ekonomi AS di tahun 2015 baik di dalam dan luar negeri yang terpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung oleh harga minyak dunia yang mulai turun dari tahun 2014 sampai akhir tahun 2015. Unit analisa dalam penulisan skripsi ini berada di tingkat negara (AS). Skripsi ini juga

menambahkan data-data di luar batas jangkauan penelitian yang masih memiliki relevansi terhadap batasan skripsi ini.

#### G. Metode Penelitian

##### 1. Metode Pengumpulan Data

Skripsi ini dilengkapi dengan data-data sekunder yang dihimpun melalui informasi-informasi dan literatur-literatur relevan yang berasal dari buku-buku, media massa, media elektronik (internet), serta data lainnya yang memiliki relevansi terhadap rumusan masalah. Hasil dari himpunan data sekunder tersebut lalu menjalani proses studi dokumen sebelum dimasukkan sebagai bagian dari isi skripsi.

##### 2. Metode Pengolahan Data

Skripsi ini akan ditulis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data-data yang berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas topik yang mirip atau serupa dengan skripsi ini juga akan digunakan sebagai data sekunder yang kemudian diolah untuk membantu materi pembahasan skripsi. Fluktuasi harga minyak bumi dunia dan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah AS merupakan dua variabel yang memiliki keterkaitan dan perlu dianalisis oleh penulis untuk mendapatkan kesimpulan dan jawaban dari rumusan masalah.

##### 3. Metode Pembuktian Hipotesis

Setelah data-data yang didapat diolah, hasilnya tersebut akan digunakan sebagai alat untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan dari hipotesis yang telah ditulis di atas.

#### H. Sistematika Penulisan

**Bab I** merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** membahas mengenai fenomena minyak bumi dalam politik luar negeri dan posisinya sebagai alat tawar dari negara-negara penghasil minyak (politik minyak).

**Bab III** membahas dinamika kebijakan pemerintah AS terhadap energi khususnya minyak bumi dan kaitannya dengan situasi ekonomi politik di dalam negeri dan dunia internasional.

**Bab IV** membahas pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi terjadinya perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah AS terkait ekspor minyak bumi ke luar negeri disaat harga minyak dunia mengalami penurunan.

**Bab V** merupakan kesimpulan atau penutup dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang berisi ringkasan mengenai susunan penelitian dalam skripsi ini dari seluruh hal yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya.